

**POLITIK ISLAH**  
**Re-Negosiasi Konflik, Islah dan Otoritas Kepemimpinan NW**

*Oleh:*  
**Saipul Hamdi**  
*(Kandidat Doktor, CRCS, UGM)*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur dan kultur konflik yang muncul di internal organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi proses terjadinya reproduksi sosial atas konflik di dalam NW. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memahami terjadinya islah secara instan pada bulan Mei 2010, dan kepentingan dibalik islah tersebut. Makalah ini merupakan bagian dari disertasi saya di program studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS). Pengambilan data lapangan dilakukan selama satu tahun pada tahun 2008 di Lombok Timur NTB. Lokasi penelitian tidak di satu desa, tetapi di beberapa desa yang menjadi tempat terjadinya konflik NW. Namun saya memprioritaskan dua desa yang menjadi pusat organisasi NW di desa Pancor dan Anjani. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif di dalam proses pengambilan dan analisa data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *partisipant-observation*, *in-depth interview*, fokus dikusi kelompok (FGD) dan dokumentasi. Saya tinggal bersama masyarakat dan mengikuti semua kegiatan baik yang bersifat keagamaan, adat, budaya, organisasi, dan kegiatan politik terutama yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Saya juga menggunakan metode *self-reflection* di dalam pengambilan dan analisa data. Metode ini sangat penting melihat relasi peneliti dengan subjek adalah relasi kekuasaan, yang mana peneliti harus sadar dengan unsur gender, umur dan klas yang terdapat pada dirinya yang akan mempengaruhi data yang diperoleh selama penelitian.

**Keyword:** *NW, islah, reproduksi, dan konflik.*

**A. Latar Belakang**

Fenomena konflik merupakan salah satu ancaman besar yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 ditandai dengan munculnya berbagai konflik komunal hampir di setiap daerah di Indonesia (Anwar et al., 2005; Nugroho et al., 2004; Rozi et al., 2006). Pada dasarnya konflik bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia yang muncul hanya pada masa reformasi. Konflik telah muncul jauh sebelum masa kemerdekaan (Colombijn, 2005: 281). Selama tiga setengah abad rakyat Indonesia mengalami konflik dan perang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Setelah berhasil mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan, benih-benih konflik tidak

hilang begitu saja, sebaliknya konflik muncul dan mengalami reproduksi dalam ruang, proses, struktur, konteks dan sejarah yang berbeda<sup>1</sup>.

Konflik terus meluas melanda bangsa Indonesia pada awal masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sukarno menghadapi berbagai konflik politik di daerah dan di pusat yang akhirnya memaksa dia menyerahkan tampuk kepemimpinan negara kepada Suharto pada pertengahan tahun 1966 (Ricklefs, 2005: 518; Hefner, 2000: 58). Kepemimpinan Suharto telah melahirkan perubahan yang sangat besar di Indonesia di semua bidang termasuk ekonomi dan politik. Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari munculnya fenomena konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah seperti gerakan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Papua Merdeka, dan Republik Maluku Selatan (RMS). Saya berargumen bahwa sebagian besar konflik sosial yang muncul sekarang ini tidak lepas dari kesalahan orde baru. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orde baru selama 32 tahun mengalami titik balik pada masa reformasi yang memberikan kebebasan dan keterbukaan untuk berpendapat dan bersuara melalui praktik sistem demokrasi. Negara tidak lagi memiliki kontrol yang kuat seperti yang terjadi pada masa orde baru sehingga berbias pada stabilitas sosial-politik nasional dan lokal<sup>2</sup>.

Konflik-konflik yang muncul pada masa reformasi lebih bersifat komunal yang melibatkan masyarakat, organisasi atau institusi sosial lainnya (Tomagola, 2006: 14-15; Hamdi & Smith, 2009). Konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan identitas budaya, bahasa dan agama, tetapi juga karena kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan. Anthony Giddens mengatakan, konflik sangat dekat dengan ideologi, politik dan kekuasaan, bahkan sebagian besar konflik hanya disebabkan oleh faktor kekuasaan (Giddens, 1997: 571). Fenomena konflik komunal di Indonesia seperti yang terjadi di Ambon, Maluku, Poso, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan politik. Menurut Van Klinken (2005: 94, 99) unsur politik sangat dominan pada kasus-kasus konflik di daerah tersebut, sehingga menyebabkan konflik terus mengalami polarisasi, reproduksi, dan eskalasi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Konflik pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti gerakan DI/TII di Jawa Barat di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh, konflik pasukan Hizbullah di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah (lihat Notosusanto, Poesponegoro, 1992: 360). Selain itu terjadi konflik PKI di Jawa Timur tanggal 30 September 1965 (lihat Roosa, 2008), gerakan RMS di Maluku (Pieris, 276), dan konflik GAM di Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro (lihat Abdullah, 2006; Al-Chaidar, 1999: 284) dan Gerakan OPM di Papua Barat (Singh, 2008:238).

<sup>2</sup> Pandangan lain juga muncul jika konflik komunal yang terjadi di beberapa daerah pasca Suharto sengaja diciptakan oleh kelompok militer. Militer dinilai memiliki andil besar di balik peristiwa konflik seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, Poso dan lain-lain. Tamrin Amal Tomagola melihat tindakan kelompok militer ini karena mereka tidak lagi berkuasa memegang jabatan strategis di pemerintahan sejak pemerintahan Habibi dan Gusdur. Lebih lanjut Tomagola menyatakan konflik-konflik tersebut mulai reda pada masa pemerintahan Megawati karena dia memberikan jabatan-jabatan penting kepada kubu Militer (Tomagola, 2006).

<sup>3</sup> Konflik dan kekerasan di kabupaten Tobelo dan Galela di Ternate sangat kental dengan nuansa politik antara elit Muslim dan Kristen. Mereka bersaing untuk menguasai daerah baru itu dengan cara memenangkan Pemilu. Kedua kubu membawa bendera agama sebagai basis legitimasi kekuasaan mereka (lihat Wilson, 2008: 130-131).

Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang sangat rawan dengan konflik komunal sejak orde baru turun dari kekuasaan. Dalam satu dekade terakhir ini beberapa daerah di NTB terjadi konflik antara kampung, antara agama, dan konflik internal keagamaan yang melibatkan organisasi Islam. Konflik yang bersifat keagamaan mendominasi konflik komunal yang terjadi di Lombok baik. Di antara konflik yang pernah terjadi di Lombok pasca Suharto adalah konflik antara agama Islam dengan Kristen tahun 2000 di Mataram, konflik internal organisasi Nahdlatul Wathan (NW) tahun 1998 hingga sekarang di Lombok Timur, konflik antara jama'ah Ahmadiyah dengan masyarakat lokal tahun 2002 hingga sekarang di Lombok Timur, Tengah dan Lombok Barat, konflik kelompok Amphibi dengan komunitas Hindu di Mataram tahun 1999, Amphibi dengan komunitas desa Perampauan 2000 di Lombok Barat, dan konflik LDII dengan masyarakat lokal tahun 2002 di Lombok Timur<sup>4</sup> (Kristiansen, 2003: 121-122; Avonius, 2004: 66; Macdougall, 2007: 297; Hamdi & Smith, 2009: 2).

Tulisan ini akan mengeksplorasi konflik komunal di internal organisasi Nahdlatul Wathan (NW) yang terjadi di Lombok Timur tahun 1998 hingga sekarang. NW merupakan organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah. NW merupakan kelompok mayoritas Muslim terbesar di Lombok yang memiliki sekitar 2 juta anggota<sup>5</sup> (Baharuddin, 2007: 111-115; Rasmianto dan Baharuddin, 2004: 42; Nu'man, 1999: 32). Perpecahan dan konflik NW muncul setelah Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainuddin atau Maulana Syeikh, pendiri NW, wafat pada tahun 1997. Terdapat dua kubu yang muncul (kubu R1 dan R2) di dalam organisasi NW pasca Syeikh yang dipimpin oleh kedua putrinya<sup>6</sup>. Mereka bersaing memperebutkan posisi sebagai pemimpin NW yang baru menggantikan Syeikh (MacDougall, 2007: 286). Konflik mengalami puncak pada Muktamar NW ke 10 tahun 1998 di Praya, Lombok Tengah. Hasil Muktamar menunjukkan bahwa salah satu kubu memenangi pemilihan ketua umum pengurus besar (PB) NW untuk lima tahun ke depan. Kemenangan ini tidak diterima oleh kubu yang lain karena dianggap tidak sah dan melanggar aturan organisasi. Hasil Muktamar melahirkan pro-kontra di kalangan elit-elit NW sehingga berdampak pada konflik dan kekerasan yang berkepanjangan antara pendukung kedua kubu (Sapruddin, 2005; Nazri, 2000).

Konflik internal jama'ah NW terus terjadi sejak tahun 1998 hingga sekarang. Sepanjang tahun 1998-2002 berbagai tragedi dan peristiwa kemanusiaan terjadi dalam komunitas NW, seperti pembunuhan dan pembakaran rumah oleh

---

<sup>4</sup> Beberapa faktor lain yang menyebabkan potensi konflik di Lombok juga disebutkan oleh Sapiin et al, di dalam sebuah laporan penelitian yang tidak dipublikasikan kerjasama antara Universitas Gunung Rinjani dengan Bappeda kabupaten Lotim yaitu faktor budaya kawin lari, sengketa tanah, kebijakan pemerintah daerah di bidang pemekaran, kampanye partai politik pada Pemilu dan perkelahian antara pemuda (lihat Sapiin, 2004).

<sup>5</sup> Tidak ada data statistik tentang jumlah anggota jama'ah NW. Selama ini belum ada sistem yang memuat identitas sebagai warga NW seperti kartu anggota. Dari jumlah warga Lombok yang mencapai hampir 3 juta jiwa, warga NW diperkirakan kurang lebih 2 juta.

<sup>6</sup> Kubu ini mengacu kepada nama anaknya yaitu kubu Rauhun (R1) dan kubu Raihanun (R2). Kedua kubu ini didukung oleh elit-elit dan jama'ah NW yang di kenal sangat loyal dan fanatik terhadap pemimpin organisasi. Keberpihakan mereka juga karena faktor kepentingan (lihat Nazri, 2000; Sapruddin, 2005; Mugni, 2005).

masing-masing kubu. Massa kedua kubu tidak henti-hentinya saling membalas menyerang. Situasi tidak terkontrol lagi dan sangat mencekam selama periode tersebut<sup>7</sup>. Meskipun kekerasan fisik mulai berkurang sejak tahun 2002, tetapi konflik NW masih terjadi sampai sekarang. Belum ada upaya rekonsiliasi atau islah antara kedua kubu terutama di kalangan keluarga dan elit-elit NW sehingga konflik terus mengalami reproduksi secara berkelanjutan. Pada bulan Mei 2010 terjadi islah antara keluarga Syeikh, namun hanya bersifat keluarga bukan organisasi karena hingga sekarang NW masih menganut dualisme kepemimpinan.

## B. Nahdlatul Wathan di Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menjadi tempat penelitian saya terletak antara 116°-117° BT dan 8°-9° LS. Luas wilayah Lotim adalah 2.679.88 km<sup>2</sup>, terdiri atas daratan seluas 1.605.55 km<sup>2</sup> (59.91 %) dan lautan seluas 1.074.33 km<sup>2</sup> (40.09 %). Adapun potensi sumber daya alam yang dimiliki Lotim antara lain sektor pertanian, sub-sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan pariwisata<sup>8</sup>. Dari segi pemerintahan, wilayah administrasi kabupaten Lotim terdiri dari 20 kecamatan, 119 desa atau kelurahan dan 846 dusun atau lingkungan (BPS Lotim, 2006: 23). Lotim merupakan kabupaten yang paling padat penduduknya di antara kabupaten-kabupaten yang lain di NTB. Dari sensus tahun 2006 jumlah penduduk Lotim mencapai 1.053.347 jiwa, dengan kategori laki-laki sebanyak 480.791 jiwa, dan perempuan sebanyak 572.556 jiwa (BPS Lotim, 2006: 73-91).

Nahdlatul Wathan (NW) merupakan organisasi keagamaan lokal yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Organisasi NW didirikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau yang dikenal dengan Maulana Syeikh pada tanggal 1 Maret 1953 di desa Pancor, Lombok Timur, NTB. Kata nahdlatul wathan berasal dari bahasa Arab terdiri dari kata *nahdlah* dan *wathan*, *nahdlah* berarti kebangkitan, pergerakan atau pembangunan, sedangkan *wathan* berarti tanah air atau negara. Maka secara bahasa nahdlatul wathan berarti kebangkitan tanah air, pembangunan negara atau membangun negara. Menurut Yusuf (1967) dan Nu'man (1999) kata nahdlatul wathan diambil dari penggalan nama madrasah yang didirikan tahun 1937 yaitu Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah<sup>9</sup> (Nu'man, 1999: 48; Yusuf, 1967: 31).

Istilah NW pertama kali muncul bukan berasal dari Syeikh, istilah ini telah muncul di kalangan tokoh-tokoh pejuang Islam di Surabaya tahun 1916 (Noor et

<sup>7</sup> Pihak pemerintah dan aparat kepolisian tidak dapat berbuat apa-apa melihat kondisi ini. Mereka hanya bisa menonton peristiwa kekerasan antara jama'ah NW di beberapa daerah. Aparat yang berusaha untuk menjaga keamanan desa ikut sebagai target penyerangan massa (lihat Sapruddin, 2005, Nazri, 2000).

<sup>8</sup> Lotim merupakan daerah yang potensial dalam bidang wisata baik berupa pantai maupun cagar alam, akan tetapi industri pariwisatas ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

<sup>9</sup> Tidak ada data yang pasti tentang bagaimana mulanya Maulana Syeikh menggunakan istilah NW untuk nama organisasi baru yang dia dirikan ini. Sebagian informan menjelaskan istilah NW untuk nama organisasi ini diberikan oleh gurunya dari Mekkah yaitu Syeikh Hassan Masysyat. Sebagian berpendapat istilah NW diambil dari nama gerakan yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah dari Surabaya. Sebagian juga berpandangan kata NW yang digunakan oleh Syeikh hanya untuk membedakan dengan istilah NU yang lebih dulu eksis di Jawa.

al., 2004: 294). Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mansur menggunakan istilah Nahdlatul Wathan (NW) sebagai salah satu nama organisasi pergerakan pada tahun 1916. Selain istilah NW, mereka juga membentuk Nahdlatul Tujjar dan Nahdlatul Fikri pada tahun 1918 di Surabaya <sup>10</sup>(Falakh, 1997: 171-172; Fealy, 2003: 29; Noor et al., 2004: 294). Fakta sejarah ini melahirkan sebuah tanda tanya, apakah terdapat kaitan atau hubungan antara organisasi NW yang lahir di Surabaya tahun 1916 dengan organisasi NW yang didirikan oleh Syeikh di Lombok Timur tahun 1953. Menurut Muhammad Noor secara organisatoris tidak ada hubungan antara kedua organisasi NW tersebut karena jarak waktu yang cukup jauh. Meskipun Syeikh pernah diangkat sebagai konsulat NU pada tahun 1950 perwakilan dari pulau Sunda Kecil, tetapi tidak ada data empiris sebagai dasar untuk melihat adanya hubungan kedua organisasi ini<sup>11</sup> (Noor et al., 2004: 304).

Dari segi usia, organisasi NW lahir lebih muda dibandingkan dengan organisasi keagamaan yang lain di Indonesia, seperti Muhammadiyah tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) 1926. Meskipun lahir lebih muda, namun dalam praktiknya organisasi NW telah beroperasi sejak tahun 1934. Cikal bakal organisasi NW pada awalnya adalah sebuah pesantren yang didirikan oleh Syeikh tahun 1934 ketika kembali dari Mekkah. Pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Al-Mujahidin (Noor et al., 2004: 180). Pondok pesantren Al-Mujahidin hanya berjalan selama tiga tahun, kemudian diganti dengan madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yang dibangun tahun 1937 dan madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang didirikan tahun 1943 <sup>12</sup> (Noor, et al., 2004: 190; Nu'man, 1999: 31; Yusuf: 1976: 25-26).

Organisasi NW bergerak dalam tiga bidang yaitu pendidikan, sosial dan dakwah. Di bidang pendidikan, NW secara berkelanjutan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai daerah di Lombok mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Hampir 1500 lebih cabang lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi NW. Di bidang sosial, NW mendirikan beberapa panti asuhan untuk anak yatim dan anak-anak terlantar. NW juga melakukan kerja sama dengan organisasi pemerintah dan NGO di bidang kesehatan, keluarga berencana (KB), dan kelangsungan hidup anak. Sedangkan di bidang dakwah, NW membangun majlis dakwah dan majlis ta'lim, mengadakan pengajian keliling desa setiap hari, minggu, bulan dan setiap tahun secara bergantian. Selain itu, NW

---

<sup>10</sup> Nahdlatul Tujjar adalah organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan, sedangkan Nahdlatul Fikri adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pemikiran. Organisasi-organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kondisi masyarakat yang mengalami keterbelakangan pendidikan dan dakwah akibat hegemoni kelompok kolonial. Organisasi ini sempat dicurigai oleh pemerintah Belanda yang dianggap sebagai gerakan politik (lihat Ridwan, 2010: 36-37).

<sup>11</sup> Kalau melihat sejarah Syeikh yang aktif di organisasi NU dan pernah memegang jabatan sebagai konsulat NU perwakilan dari pulau Sunda Kecil terdapat kemungkinan jika NW merupakan organisasi sempalan dari NU.

<sup>12</sup> Alasan pembubaran pesantren Al-Mujahidin adalah berangkat dari ketidakpuasan Maulana Syeikh dengan sistem belajar mengajar yang diterapkan di dalam pesantren. Sistem pendidikan pesantren dinilai kurang maju dan sangat terbatas. Oleh karena itu Syeikh beralih ke sistem madrasah. Dia membangun madrasah NWDI, yang khusus untuk laki-laki dan NBDI, yang khusus untuk perempuan. Kedua madrasah ini disebut dengan *dwi tunggal pantang tanggal*.

mengembangkan tradisi ritual seperti *hiziban*, *wiridan* atau *zikiran*, *barzanji*, *syafa'ah*<sup>13</sup>. NW juga mengembangkan kesenian dengan menciptakan lagu-lagu berbahasa Arab, Indonesia dan Sasak yang benefaskan Islam (Noor et al., 2004; Nu'man, 1999; Baharuddin dan Rasmianto, 2004; Syakur, 2005; Baharuddin, 2007).

Dari sisi ideologi, NW lebih dekat ke NU daripada Muhammadiyah. NW menganut paham aqidah Islam *Ahlussunnah wa Al-Jama'ah* dengan menerapkan mazhab Imam Syafi'I sebagai mazhab tunggal organisasi. Asas organisasi NW adalah Pancasila sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1985<sup>14</sup>. Khittah NW adalah tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan manapun (Nu'man, 1999; Noor et al., 2004). Meskipun demikian, dalam realitasnya sangat berbeda karena NW dari sejak dibentuk tidak bisa dipisahkan dari kegiatan politik praktis baik di tingkat lokal maupun nasional. Pada Pemilu pertama tahun 1950, Syeikh ikut aktif ke dalam partai Masyumi dan di tahun 1952 diangkat sebagai ketua badan penasehat Masyumi untuk daerah Lombok. Setelah Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Sukarno, Syeikh ikut membentuk Parmusi bersama ormas-ormas lain<sup>15</sup> (Noor et al., 2004: 245-246). Sejak orde baru muncul di pentas politik nasional, NW bergabung bersama sektariat bersama (Sekber) partai Golkar. Pada 1970 NW secara resmi bermitra dengan partai Golkar (Noor et al., 2004: 257-248). Di era reformasi yang diikuti oleh perubahan sistem demokrasi dengan multi partai memposisikan NW sebagai organisasi yang sangat dipertimbangkan oleh partai politik. Afiliasi politik NW ikut mengalami perpecahan karena kondisi NW yang sedang konflik internal. Pada pemilu 1999, kubu R1 bergabung dengan PDR dan kubu R2 memilih tetap bersama Golkar. Pada pemilu 2004 kedua kubu kembali mengganti haluan politiknya, kubu R1 berafiliasi ke Partai Bulan Bintang (PBB), dan kubu R2 berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi (PBR). Adapun hasil kedua kubu dalam perolehan suara pada Pemilu 2004 hampir berimbang. Berikut adalah tabel suara sah partai politik di kabupaten Lombok Timur,

---

<sup>13</sup> Hiziban adalah sebuah kegiatan ritual membaca buku *hizib* atau kumpulan do'a-do'a yang berbahasa Arab. Buku hizib disusun oleh Syeikh ketika masih di Mekkah. Biasanya pembacaan *hizib* dilakukan bersama-sama setiap malam jum'at setelah shalat magrib di masjid. Jama'ah NW percaya bahwa membaca hizib NW dapat melindungi dirinya dari berbagai bahaya. Wiridan atau zikiran adalah sebuah kegiatan ritual yang dilakukan oleh jama'ah NW dengan mengucapkan kata-kata tertentu yang telah ditetapkan oleh pemimpin NW. Wiridan atau zikiran terdiri dari kata-kata atau kalimat bahasa Arab yang memiliki berbagai fungsi. Barzanji merupakan kumpulan tulisan yang berbentuk nyanyian atau bait-bait syair yang berbahasa Arab yang berisi tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad dan keluarganya. Syafa'ah adalah kegiatan pengumpulan amal atau *charity* untuk pembangunan gedung-gedung madrasah dan Yayasan NW.

<sup>14</sup> Yang menarik adalah Syeikh tidak menggunakan Islam sebagai asas organisasi, tetapi menggunakan Pancasila. Padahal pada waktu itu belum ada ketentuan yang mengharuskan menggunakan Pancasila sebagai asas organisasi. Ini menunjukkan Syeikh sangat kooperatif dengan pemerintah. Dalam catatan hidupnya, Syeikh jarang sekali bersinggungan dengan kebijakan pemerintah, tapi selalu ambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut misalnya dalam sosialisasi program KB di Lombok.

<sup>15</sup> Keterlibatan Maulana Syeikh selaku pendiri NW di dalam politik praktis menunjukkan bahwa politik tidak asing lagi bagi NW. NW telah berpartisipasi di dalam pembangunan politik di Indonesia sejak pada masa orde lama.

**Tabel 1.**  
**Prolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Lombok Timur**

No.	Partai Politik	Suara Sah		
		DPRD II Kabupaten	DPRD I Provinsi	DPRD Pusat
1.	Partai Golongan Karya	103.008	71.374	94.060
2.	<b>Partai Bulan Bintang</b>	96.848	81.397	112.278
3.	<b>Partai Bintang Reformasi</b>	68.802	59.098	69.300
4.	Partai Persatuan Pembangunan	45.823	38.216	44.323
5.	PDI perjuangan	32.775	24.120	30.223

Sumber: BPS Lotim 2006

### C. Struktur dan Kultur Konflik NW

Konflik komunal di Indonesia tidak hanya muncul di dalam sebuah komunitas, tetapi juga di dalam sebuah organisasi sosial. Konflik internal NW yang terjadi pada tahun 1998 di Lombok termasuk dalam kategori konflik organisasi. NW merupakan organisasi sosial keagamaan tempat berkumpulnya agen-agen sosial yang berkotestasi<sup>16</sup> untuk memperoleh berbagai kepentingan, posisi, peran dan modal (Haryatmoko, 2003: 14; Bourdieu, 1977; 72; Harker et al., 2006: 10). Perbedaan posisi, peran dan kepentingan inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya kompetisi dan kontestasi antara agen yang berimplikasi pada konflik dan kekerasan (Bourdieu, 1977; Dahrendorf, 1986). Konflik NW berawal dari konflik antara elit-elit NW dalam perebutan kekuasaan baik di dalam maupun di luar organisasi NW<sup>17</sup>. Tidak ada perbedaan ideologi di dalam konflik ini, tetapi lebih disebabkan oleh perebutan status, legitimasi, kekuasaan dan warisan. Elit-elit NW yang terbagi ke dalam kubu-kubu merupakan representasi dari kelompok-kelompok kepentingan yang terdapat di NW<sup>18</sup>. Mereka telah muncul sejak organisasi NW lahir dan terus berupaya eksis dan bersaing mempertahankan dan mencapai kepentingan mereka. Saya berargumen bahwa NW menjadi tempat memperoleh modal ekonomi (materi, barang) dan

<sup>16</sup> Makna kontestasi di sini adalah *event* di dalamnya orang-orang berkompetisi untuk supremasi yang berakibat pada konflik dan pertentangan. Kontestasi juga bermakna kompetisis untuk memperoleh posisi dan kekuasaan.

<sup>17</sup> Perebutan kekuasaan untuk posisi sebagai pemimpin NW hanya salah satu wilayah yang kelihatan di permukaan secara jelas, tetapi target yang lebih luas adalah perebutan lahan-lahan kekuasaan di luar NW seperti di masyarakat dan pemerintahan sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

<sup>18</sup> Setelah Syeikh wafat, setidaknya terdapat tiga kubu yang muncul yaitu kubu pro Rauhun, kubu pro Raihanun dan kubu netral. Kubu yang netral sulit untuk bertahan karena mau tidak mau mereka harus memilih afiliasi mereka di antara kedua kubu tersebut yang diklaim sebagai kelompok yang sah dan legitimet dalam NW. Kelompok netral mempunyai dua makna, netral dengan tidak mendukung kedua-duanya, atau mendukung kedua-duanya. Kelompok netral ini menamakan dirinya sebagai kubu Maulana Syeikh. Prinsipnya yang penting NW.

non-ekonomi (non materi) dan sekaligus sebagai tempat pertarungan agen-agen untuk memperebutkan dan mempertahankan modal tersebut.

Untuk memahami proses dan mekanisme konflik NW, maka sangat penting melihat dan menguji aspek-aspek seperti kekuasaan, struktur organisasi dan kultur masyarakat lokal di Lombok yang merupakan habitus NW. Kekuasaan lahir dari sebuah relasi yang dibangun oleh aktor-aktor sosial di masyarakat (Dahrendorf, 1986: 21; Anderson, 1972: 5). Kekuasaan berasal dari berbagai sumber tidak hanya dari ekonomi tetapi juga dari non-ekonomi seperti budaya, agama dan kekuasaan simbolik (Anderson, 1972: 7; Harker et al., 2006: 12). Konstruksi kekuasaan di NW berasal dari dalam struktur organisasi NW dan di luar struktur yaitu kultur yang berkembang di komunitas NW.

Kekuasaan dalam struktur organisasi NW dikonstruksi berdasarkan sistem pembagian peran dan posisi oleh para agen. Di dalam sistem pembagaian peran dan posisi terdapat unsur paksaan atau dominasi oleh salah satu kelompok (mendominasi) terhadap kelompok lain (terdominasi) (Dahrendorf, 1986: 203). Sistem pembagian peran dan posisi inilah yang melahirkan relasi kekuasaan dan otoritas antara agen. Kekuasaan adalah hubungan faktual karena adanya unsur-unsur paksaan dan perlawanan dari seseorang atau kelompok, sedangkan otoritas adalah hubungan yang tidak faktual karena dikonstruksi oleh sistem pembagian peran dan posisi mereka yang legal formal (Dahrendorf, 1986: 204). Saya melihat relasi kekuasaan lebih kuat daripada relasi otoritas di dalam praktik-praktik sosial di NW. Aturan-aturan organisasi tidak berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Kelompok yang berkuasa atau atasan seringkali membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan bawahannya. Kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok lebih utama daripada kepentingan organisasi<sup>19</sup>.

Konflik NW juga muncul akibat dari ketidakseimbangan *sharing* kekuasaan (posisi dan peran) antara kedua kubu. Salah satu kubu ingin mendominasi atas kubu yang lain sehingga menimbulkan perlawanan dan resistensi dari kubu yang merasa didominasi, padahal kedua kubu merasa berhak dan merupakan representasi dari kelompok kepentingan yang sah di dalam organisasi NW. Terdapat upaya-upaya untuk menjegal salah satu kubu di NW dan ini menjadi penguasa tunggal<sup>20</sup>. Sementara elit-elit NW yang memiliki kepentingan tidak ingin melihat kedua kubu ini bersatu karena mereka tidak ingin kehilangan peran dan posisinya di dalam organisasi. Elit-elit tersebut sangat kreatif menciptakan peluang-peluang konflik dan memeliharanya selama mungkin<sup>21</sup>.

Sumber-sumber kekuasaan di luar struktur organisasi adalah kultur lokal, tradisi dan praktik keagamaan juga sangat penting untuk diuji dalam rangkan memahami frame konflik yang diciptakan oleh elit NW. Kultur, tradisi dan praktik

---

<sup>19</sup> Pemecatan-pemecatan oleh atasan terhadap bawahan di dalam organisasi NW yang tidak prosedural telah menyebabkan konflik antara bawahan dan atasan. Pemecatan-pemecatan yang kontroversial di NW telah terjadi sejak masa Syekh masih hidup.

<sup>20</sup> Upaya penjegalan ini merupakan bentuk kekerasan simbolik atau kekerasan struktural yang dilakukan oleh salah satu kubu sehingga melahirkan perlawanan fisik (Lihat Jnekins, 1992: 103).

<sup>21</sup> NW tidak pernah sepi dari gesekan-gesekan antara elit, kasus tahun 77, 82 dan 1998 adalah hasil dari kreatifitas mereka selama bertahun-tahun.

keagamaan lokal telah membentuk pola-pola kekuasaan yang berkembang di masyarakat Sasak. Sebelum Islam datang, masyarakat Sasak telah menganut dan mengembangkan budaya *patron-client*. Masyarakat Sasak terbagi ke dalam stratifikasi sosial yang berbeda-beda tingkatannya. Terdapat dua tingkatan yang masih bertahan hingga sekarang yaitu kelompok bangsawan (*menak*) dan kelompok masyarakat bawah (*jajar karang*) (Syakur, 2006: 227; Budiwanti, 2000: 246). Kelompok *menak* berasal dari keluarga dan keturunan raja yang digelar *Raden Nuna* untuk laki-laki dan *Denda* untuk perempuan<sup>22</sup>. Kelompok inilah yang memegang kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan di Lombok sejak masa kerajaan hingga masa kemerdekaan.

Melemahnya peran kelompok adat di masyarakat Lombok telah digantikan oleh peran tokoh agama atau yang dikenal dengan tuan guru. Para tuan guru mengambil alih peran yang selama ini dimainkan oleh tokoh-tokoh adat di berbagai bidang (Budiwanti, 2000: 290-291). Artinya, institusi agama telah menggantikan institusi adat. Saya tidak mengatakan peran adat diambil alih oleh agama secara total, karena masih terjadi dialog dan sinkretisasi antara agama dan budaya, antara tokoh adat dengan tokoh agama. Meskipun terjadi transisi oleh tokoh-tokoh agama, tetapi sistem relasi *patron-client* yang dibangun tidak pernah berubah hingga sekarang. Apalagi sistem kepemimpinan sufi yang menekankan loyalitas dan keta'atan seorang murid kepada guru sangat cocok dengan sistem *patron-client* yang berkembang pada masa tradisional di Lombok. Sistem *patron-client* hanya berganti bentuk dan baju di dalam kekuasaan tokoh-tokoh agama sekarang ini karena esensinya tetap sama.

Saya berargumen bahwa kekuasaan yang dibangun di dalam organisasi dan komunitas NW berdasarkan sistem kepemimpinan sufistik yang menekankan keta'atan seorang murid kepada guru. Guru yang dimaksud di sini adalah guru secara umum seperti guru di sekolah, dosen dan *tuan guru* khususnya. Apa yang dikatakan oleh guru harus diikuti oleh jama'ah NW tanpa bertanya lebih jauh. Jargon yang digunakan di NW adalah *sami'na wa-atha'na*, mendengar dan menta'ati seluruh perintah guru termasuk kebijakan organisasi yang dibuat oleh mereka. Bourdieu (1977) menyebut kondisi ini sebagai *doxa*, masyarakat hanya *take for granted* tidak boleh mengkritisi apalagi menentang kebijakan dan perintah guru (Bourdieu, 1977: 164). Konsep kepemimpinan sufistik inilah yang dikembangkan oleh Syeikh di NW secara ketat. Jargon *sami'na wa-atha'na* merupakan doktrin NW yang terus mengalami internalisasi di kalangan jama'ah NW. Jika terdapat tokoh yang berani menentang doktrin ini maka dia harus siap menanggung resiko seperti pemecatan secara tidak hormat dari keanggotaan organisasi NW<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Kelompok *menak* memiliki tingkatan-tingkatan. Keluarga raja yang masih murni digelar *raden nuna* untuk laki-laki dan *denda* untuk perempuan. Sedangkan keluarga yang tidak murni seperti menikah dengan kasta yang lebih rendah maka dia akan digelar *lalu* untuk laki-laki dan *baiq* untuk perempuan (lihat Syakur, 2005).

<sup>23</sup> Pernah terjadi sebuah kasus ketika salah seorang tuan guru di NW menentang dan mengkritisi kebijakan organisasi NW. Konsekuensinya dia harus menerima pemecatan dari pimpinan NW. Dia mencoba mengubah doktrin NW dari *sami'na wa-atha'na* menjadi *sami'na wa-fakkarna wa-atha'na*.

Tuan guru merupakan kelompok tertinggi dalam hirarki keagamaan di Lombok. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar karena dilegitimasi oleh modal spiritual dan keagamaan yang mereka miliki. Mereka ibarat raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Posisi mereka sama dengan kiai-kiai di Jawa yang diibaratkan sebagai raja (Dhofier, 1994: 56). Menurut Zamakhsyari Dhofier (1994) kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dan kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren (Ibid, 56). Tidak seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai di lingkungan kekuasaannya, kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya<sup>24</sup>. Beginilah kondisi para tuan guru di NW, bahkan para tuan guru lebih kuat posisinya karena selain mengelola pesantren dan madrasah NW, mereka juga aktif di masyarakat melakukan pengajian keliling secara rutin (Budiwanti, 2000: 291). Tuan guru mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan di masyarakat yang tidak boleh dimasuki oleh tuan guru yang lain.

Di dalam komunitas NW terdapat hirarki di antara tuan guru. Syeikh selaku pendiri NW adalah tuan guru yang paling tinggi tingkatannya. Dia tidak hanya dianggap sebagai tuan guru, tetapi juga sebagai *wali* yang memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat kuat. Setelah dia meninggal masyarakat meyakini jika dia adalah sultan dari semua wali di alam kubur atau yang disebut dengan *sultan auliya*<sup>25</sup> (Van Bruinessen dan Howell, 2007). Yang menarik adalah ketika konsep kepemimpinan sufistik yang dikembangkan oleh Syeikh di organisasi dan komunitas NW dipolitisasi oleh elit-elit NW untuk kepentingan politik dan kekuasaan pribadi dan kelompok mereka. Seringkali konsep kepemimpinan sufi yang loyal dan ta'at kepada guru mengakibatkan konflik internal ketika muncul intervensi kepentingan politik. Saya melihat inilah yang terjadi di NW, Syeikh yang menjadi simbol kekuatan sufistik di komunitas NW membuat para elit-elit NW berkontestasi untuk memperoleh legitimasinya. Siapa yang dekat dengannya, akan mendapat legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Melalui Syeikh, para elit saling menjatuhkan dan menjelekkkan satu sama lain.

#### **D. Konflik Internal NW: Penolakan Kepemimpinan Perempuan**

Konflik NW tahun 1998 merupakan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya, puncak dari proses rentetan sejarah panjang yang melibatkan elit-elit NW dalam pertarungan perebutan kekuasaan, posisi-posisi dan peran strategis baik di dalam maupun di luar organisasi NW. Meskipun terlalu jauh untuk

---

<sup>24</sup> Banyaknya tuan guru di Lombok seringkali menyebabkan persaingan dan konflik antara tuan guru. Mereka berkontestasi memperebutkan pengaruh di masyarakat dan teritori kekuasaan mereka. Setiap tuan guru mempunyai wilayah kekuasaan yang tidak boleh dimasuki oleh tuan guru yang lain.

<sup>25</sup> Di dalam kepercayaan kelompok sufi bahwa setelah para wali meninggal, mereka memiliki tugas dan kekuasaan baru di dalam alam kubur. Mereka mempunyai kerajaan di alam ini yang dipimpin oleh seorang raja. Siapa yang paling tinggi tingkat kesalahannya maka dia akan diangkat sebagai pemimpin (lihat Van Bruinessen, 2007)

mengkaitkan hubungan konflik NW tahun 1998 dengan konflik NW tahun 1977<sup>26</sup> di masa-masa awal perkembangannya karena konteksnya sudah berbeda, tetapi secara tidak langsung terdapat benang merah yang menghubungkan antara konflik yang berbeda dekade tersebut. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar aktor-aktor yang terlibat konflik sekarang ini merupakan aktor-aktor lama. Saya beargumen bahwa konflik NW merupakan konflik ‘warisan’ antara kerabat Syeikh yang ingin menguasai seluruh aset-aset NW<sup>27</sup>.

Konflik NW terjadi pada masa transisi kepemimpinan NW dari generasi Syeikh ke generasi berikutnya. Syeikh wafat tahun 1997 persis satu tahun sebelum Suharto turun dari jabatan kepresidenan Indonesia. Kepergian Syeikh melahirkan pertanyaan siapakah yang akan mengganti posisinya sebagai pemimpin organisasi NW dan sekaligus sebagai pemimpin ummat Islam di Lombok pada umumnya. Sementara dia tidak memiliki anak laki-laki tetapi hanya anak perempuan yaitu Siti Rahun (R1) dan Siti Raihanun (R2). Dari kedua putrinya tersebut telah lahir cucu laki-laki dan perempuan, namun karena usia yang masih sangat muda, mereka belum siap untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin NW. Setelah tiga bulan Syeikh wafat, Lalu Gde Wiresentane menyusul kemudian. Wiresentane adalah menantunya, suami pertama Raihanun<sup>28</sup>, yang menjabat ketua umum PB NW dari sejak tahun 1986-1977. Wafatnya kedua tokoh ini, maka secara otomatis NW membutuhkan pimpinan organisasi yang baru.

Wafatnya Syeikh merupakan sebuah babak baru bagi organisasi dan komunitas NW. Kepergian tokoh kharismatik ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi jama’ah NW. Terjadi konflik dan perpecahan terbuka antara keluarga, kerabat dan elit-elit NW untuk memperebutkan jabatan politis sebagai ketua umum organisasi. Pada dasarnya, sejak Syeikh masih hidup konflik antara keluarga Rahun (R1) dan Raihanun (R2) sering terjadi, sehingga hubungan mereka tidak pernah stabil. Di satu sisi, elit-elit NW tidak pernah netral dan sebaliknya mereka selalu memihak kepada salah satu dari kedua putri Syeikh sehingga konflik terus mengalami eskalasi dan reproduksi di tengah-tengah jama’ah NW, padahal Syeikh telah berpesan kepada jama’ahnya untuk tidak berpihak kepada salah satu putrinya. ‘Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap putri saya karena prilaku tersebut sama dengan menghina saya’, kata

---

<sup>26</sup> Tahun 1977 merupakan awal konflik yang terjadi dalam organisasi NW. Konflik ini mengakibatkan goncangan hebat dalam organisasi NW. Konflik 1977 melibatkan unsur politik dan persaingan antara elit-elit NW. Suami pertama Ummi Rahun yakni Jalaluddin yang menjadi ketua umum PB NW harus tersingkir dari jabatannya. Dia dipecat oleh Syeikh karena menentang kebijakannya yang menerima kembali H. Zasaki sebagai pengurus NW. H. Jalaluddin tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan memperotes keras pemecatan dirinya. Dalam suratnya kepada Syeikh bahwa pemecatan tersebut tidak sesuai dengan aturan organisasi, apalagi dirinya sedang mengemban amanat untuk belajar di Jakarta.

<sup>27</sup> Warisan di sini memiliki dua makna, pertama dalah mewarisi konflik yang pernah terjadi sebelumnya antara kerabat Syeikh yang diwarisi secara turun-temurun. Kedua adalah berkonflik karena perebutan harta warisan yang berupa aset-aset organisasi NW.

<sup>28</sup> Sejak Wiresentane wafat tahun 1997, Raihanun kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Hayyi Nu’man, salah satu tokoh NW yang sekarang menjabat sebagai Sekjen PB NW sejak terpilihnya Raihanun sebagai ketua umum PB NW di Mukthamar Praya, Lombok Tengah.

Syeikh<sup>29</sup>. Realitasnya, elit-elit NW terjebak dalam keberpihakan karena kuatnya kepentingan ekonomi dan politik individu dan kelompok mereka.

Di akhir-akhir masa hidup Syeikh, tanda-tanda akan terjadi konflik dan perpecahan antara keluarga kedua putrinya sudah mulai nampak. Sementara elit-elit sebagai pendukung dari kedua kubu terus saling menjatuhkan. Kedua kubu seringkali berseberangan dalam pengambilan kebijakan organisasi karena perbedaan kepentingan. Kubu R2 lebih dominan dan lebih dekat dengan Syeikh, salah satunya karena faktor Ramhatullah, ibunda Raihanun, satu-satunya istri masih hidup mendampingi Syeikh hingga akhir hayatnya. Kubu R2 mengklaim sebagai kubu yang paling loyal kepada Syeikh dan mendapat restu darinya untuk mengelola dan mewarisi NW. Sementara kubu R1 terus memberikan perlawanan dan protes karena merasa didiskreditkan oleh kubu R2. Konflik semakin memanas ketika suami R1 H. M. Syubli dipecat dari jabatannya sebagai sekjen ketua umum PB NW. Apalagi muncul surat kuasa yang memberikan mandat kepada keluarga R2 untuk mengelola organisasi NW semakin membuat suasana politik di internal NW tidak menentu. Aksi saling teror antara pendukung kedua kubu tidak dapat dihindari. Dalam suasana yang tidak menentu inilah Syeikh menghembuskan nafas terakhirnya (Nazri, 2000: 8-9).

Khawatiran banyak pihak akan terjadi konflik terbuka antara kedua kubu R1 dan R2 pasca wafatnya Syeikh menjadi kenyataan. Setelah wafat, kedua kubu terus bersaing dan melakukan konsolidasi internal untuk menyambut pemilihan pemimpin NW yang baru. Serangkaian aksi kekerasan terus terjadi antara kedua kubu seperti pemukulan, intimidasi dan pengusiran oleh masing-masing pendukung keduanya. Roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena aksi kekerasan tersebut. Guru-guru tidak berani masuk mengajar ke sekolah di Pancor karena takut adanya ancaman dari salah satu pendukung kedua kubu. Di tengah konflik dan kekerasan antara pendukung kedua kubu, datanglah momentum yang ditunggu-tunggu oleh jama'ah NW yaitu Mukhtar NW ke-10 tahun 1998 di Praya, Lombok Tengah untuk memilih pemimpin NW yang baru.

Nuansa Mukhtar NW ke-10 di Praya berbeda dengan Mukhtar-Mukhtar NW sebelumnya karena tidak dihadiri oleh pemimpin kharismatik NW, Syeikh, yang telah wafat. Sebagai pendiri NW Syeikh selalu hadir pada setiap acara Mukhtar NW dan mempunyai pengaruh besar di dalam menentukan formasi kepemimpinan dan struktur kepengurusan organisasi. Ketidakhadirannya merupakan sesuatu yang baru bagi kader-kader NW karena selama ini kebijakan organisasi selalu meminta restu Syeikh sebagai orang nomor satu di NW<sup>30</sup>. Tradisi yang berkembang di Mukhtar NW sebelumnya adalah yang memegang posisi sebagai ketua umum berasal dari unsur keluarga dan kerabat Syeikh. Karena tidak memiliki anak laki-laki, Syeikh memberikan kesempatan kepada menantunya

---

<sup>29</sup> Kata-kata Syeikh tersebut sulit dipegang oleh elit-elit NW karena di beberapa kesempatan dia juga memberikan pesan untuk melibatkan Raihanun di semua kebijakan organisasi. Pesan ini disampaikan langsung kepada lima orang guru di Ma'had Daru Al-Qur'an wa Al-Hadis (Lihat Mugni, 2005).

<sup>30</sup> Orang yang menduduki posisi sebagai ketua umum NW pada priode sebelumnya selalu atas restu dan rekomendasi Syeikh. Dalam sejarahnya, posisi ketua umum dipegang oleh menantunya secara bergiliran.

untuk mengisi posisi ketua umum, sementara dirinya sebagai ketua umum dewan syuro PB NW<sup>31</sup>. Hingga sekarang tradisi ini cenderung dipelihara oleh tokoh-tokoh NW di setiap Mukhtar. Sulit bagi orang di luar keluarga Seikh menduduki jabatan sebagai ketua umum organisasi.

Mukhtar NW ke-10 tidak lepas dari persaingan dan pertarungan gengsi dan legitimasi oleh elit-elit NW, termasuk kerabat dan keluarga Syeikh. Jauh sebelum pelaksanaan Mukhtar, kedua kubu telah menyusun strategi masing-masing untuk memenangkan calon yang mereka usung. Waktu dan tempat pelaksanaan Mukhtar ditetapkan pada tanggal 24 sampai 26 Juli 1998 di Praya Lombok Tengah. (Mugni, 2005: 22). Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998 dilakukan acara pembukaan Mukhtar NW yang bertempat di lapangan Koni Praya Lombok Tengah. Mukhtar ini dihadiri oleh gubernur NTB, menteri agama yang diwakili oleh sekjen departemen agama Marwan Sarijo. Melalui perdebatan panjang panitia Mukhtar memutuskan bahwa peserta yang berhak bersuara sebanyak 92 utusan. Pemilihan ketua umum PB NW dilakukan melalui dua tahap, penjarangan bakal calon ketua umum dan pemilihan calon ketua umum. Bakal calon yang berhak maju untuk tahap kedua apabila mendapat suara minimal 18 dari keseluruhan suara.

Hasil tahap pertama pemilihan bakal calon ketua terdapat dua nama yang muncul yaitu Ummi Raihanun dan Ma'sum Ahmad. Dari jumlah pemilih sebanyak 92 orang, Raihanun memperoleh suara terbanyak 54 suara, dan Ahmad 34 suara, 1 abstain, 1 batal dan 2 utusan tidak ikut memilih. Munculnya nama Raihanun sebagai calon ketua umum tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh kubu R1 yang mengusung Ahmad. Mereka tidak pernah memikirkan nama R2 karena selama ini dikenal sebagai ibu rumah tangga. Mereka justru mengkhawatirkan nama-nama lain yang dianggap sebagai kelompok intelektual seperti TGH. Mustami'uddin Ibrahim dan Hayyi Nu'man. Saya melihat pencalonan R2 merupakan murni strategi politik oleh kubu R2 karena sebagai putri Syeikh dia akan sulit tertandingi oleh calon lain. Sementara R1, putri pertama, lebih dulu menyatakan tidak mencalonkan diri dan mendukung pamannya Ma'sum Ahmad. Pencalonan Raihanun merupakan kemenangan strategi politik dari kubu R2, dan sebaliknya kekalahan bagi kubu R1<sup>32</sup>.

Setelah pemilihan putaran pertama sidang diskor karena harus melaksanakan shalat jum'at. Kubu R1 sangat gelisah dengan munculnya Raihanun sebagai calon karena secara matis-matis mereka akan kalah, apalagi R2 adalah putri Syeikh. Salah seorang informan dari kubu R1 menceritakan tidak ada jalan lain untuk menghadang laju R2 kecuali dengan mempertanyakan statusnya

---

<sup>31</sup>Syeikh memegang jabatan sebagai ketua umum dari tahun 1953-hingga 1967. Sejak tahun 1967-1977 ketua umum dipegang oleh menantunya H. Jalaluddin, suami pertama Ummi Rahun. Tahun 1977 Syeikh mengambil alih posisi ketua umum PB NW dari H. Jalaluddin. Pada Mukhtar 1986-hingga 1997, ketua umum dipegang oleh menantunya H. Lalu Gde Wiresentane, suami Ummi Raihanun.

<sup>32</sup> Rahun dan para pendukungnya tidak pernah menyangka jika adeknya dicalonkan oleh para pendukungnya. Pihak R2 secara diam-diam memasang Raihanun untuk menghadang langkah Ahmad. Saya melihat ada kemiripan peristiwa ini pada masa Ali bin Abu Talib yang kalah dalam pemilihan khalifah setelah tidak mencalonkan dirinya. Pencalonan Raihanun juga menunjukkan keberpihakan elit-elit NW terhadap putri Syeikh.

sebagai pemimpin menurut mazhab Syafi'i. Ketika memasuki tahap kedua sebelum pemilihan dimulai, Ahmad mempertanyakan tentang keabsahan perempuan sebagai pemimpin di dalam mazhab Syafi'i. Menurut Ahmad mazhab Syafi'i tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin termasuk pemimpin organisasi NW, sedangkan NW hanya menganut satu mazhab yaitu Syafi'i. Merespon pertanyaan tersebut para anggota dewan syuro yang terdiri dari TGH. Ruslan Zain dan TGH. Hilmi Najamuddin mengatakan, tidak ada larangan perempuan sebagai pemimpin menurut mazhab Syafi'i khususnya pemimpin organisasi. Menurut penafsiran mereka, mazhab Syafi'i tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi kepala negara, imam sholat bagi laki-laki dan menjadi hakim pidana.

Mendengar respon dari dewan syuro, Ahmad merasa tidak puas. Dia mengundurkan diri sebagai calon pada putaran kedua dan mengatakan tidak bertanggung jawab dengan hasil Mukhtar. Dia melakukan *walk out* yang diikuti oleh para pendukungnya termasuk R1. Sementara para peserta Mukhtar yang mayoritas pendukung R2 tetap melanjutkan acara pemilihan tahap kedua. Mereka secara aklamasi memilih R2 sebagai ketua umum PB NW yang baru karena Ahmad dianggap mengundurkan diri. R2 dilantik sebagai ketua umum untuk masa jabatan 1998-2003. Hasil Mukhtar Praya melahirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kebu R1 menolak hasil Mukhtar karena dinilai melanggar aturan organisasi, sedangkan kubu R2 merasa sah dan tidak melanggar aturan. Kedua kubu mengklaim bahwa merekalah pihak yang benar dan yang lain salah.

Pasca Mukhtar kondisi dan situasi di kota Pancor yang menjadi pusat organisasi NW sangat menegangkan. Perbedaan penafsiran teks telah berubah menjadi konflik dan kekerasan sosial antar jama'ah NW. Baik pendukung R1 maupun R2 terus saling menteror dan melakukan tindak kekerasan. Kubu R1 lebih diuntungkan karena mayoritas masyarakat dan elit-elit NW dari Pancor mendukung mereka. Dari tanggal 6, 7, 8 dan 24 1998 pendukung R1 yang berasal dari Pancor melakukan aksi penyerangan kepada tokoh-tokoh yang pro R2. Rumah dan toko-toko mereka menjadi sasaran amuk massa pendukung (Mugni, 2005: 32; Nazri, 2000: 14). Penyerangan ini memaksa kubu R2 dan penudukungnya melakukan hijrah dari Pancor ke desa Kalijaga pada tahun 1998. Sementara kubu R1 melakukan Mukhtar Reformasi tahun 1999 di Pancor dengan mengangkat TGH. Zainul Majdi sebagai pemimpin NW yang baru. Dengan demikian terjadi dualisme kepemimpinan di dalam tubuh NW, pimpinan hasil Mukhtar Praya (1998) dan Mukhtar Reformasi (1999).

#### **E. Meluasnya Konflik NW: Dari Wacana Ke Praktik Konflik**

Perang wacana yang terjadi antara kedua kubu NW khususnya pasca Mukhtar Praya telah berubah menjadi praktik konflik dan kekerasan di masyarakat. Proses produksi dan reproduksi wacana di NW dilakukan melalui media agama yakni pengajian yang juga berfungsi sebagai legitimasi atas wacana tersebut (Foucault, 1972; Bourdieu, 1977). Apa yang dikatakan dan diwacanakan oleh elit telah menjadi kebenaran mutlak ditermima begitu saja oleh masyarakat. Wacana yang diproduksi seperti sebuah 'sabda' yang mempunyai kekuatan magis yang dapat membentuk dan mempengaruhi keputusan dan tindakan para jama'ah

NW. Mereka akan mengikuti seluruh instruksi tanpa bertanya asal-usul dan orientasi dari instruksi itu. Ketika jama'ah NW diundang ke medan perang untuk bertempur maka mereka dengan suka rela melaksanakan tugas. Mereka tidak lagi memikirkan harta ataupun nyawa sebagai taruhan tetapi hanya kesetiaan dan pelayanan yang diberikan<sup>33</sup> (Bourdieu, 1977: 164).

Praktik konflik dan kekerasan yang dilakukan antara jama'ah NW mengalami polarisasi dan reproduksi dari satu tempat ke tempat yang lain. Konflik dan kekerasan hampir terjadi di seluruh daerah di Lombok. Sulit bagi jama'ah NW untuk memposisikan diri mereka netral, mereka akan dicurigai sebagai pendukung pada salah satu kubu atau akan mengalami marginalisasi oleh kedua kubu NW<sup>34</sup>. Biasanya jama'ah NW yang mengaku netral lebih cenderung berafiliasi ke kubu R1 daripada kubu R2. Oleh karena itu, sulit sekali menemukan desa yang benar-benar netral. Ketika konflik mengalami polarisasi dan eskalasi ke desa-desa, sebagian tokoh masyarakat di desa tertentu berupaya menjaga persatuan desa untuk tidak ikut terlibat aksi kekerasan. Namun di beberapa desa para elit sengaja memprovokasi dan memobilisasi massa menyerang dusun-dusun di sekitarnya atas nama kubu masing-masing. Rumah-rumah warga diidentifikasi apakah mereka jama'ah kubu R1 atau R2 supaya tidak salah sasaran<sup>35</sup>.

Kekerasan antara jama'ah NW lebih banyak terjadi di Lombok Timur daripada di Lombok Tengah dan Barat. Meski demikian kekerasan ini melibatkan hampir seluruh jama'ah daerah di Lombok. Saya menyebut perang NW bukan hanya perang antara waraga NW tetapi perang antara *pepadu* atau pendekar Lombok<sup>36</sup>. Kedua kubu saling mengundang para *pepadu* dari desa-desa lain. Konflik NW menjadi ajang adu ilmu kesaktian oleh para pendekar-pendekar di Lombok. Menurut informasi di lapangan, perang 'atas' lebih dahsyat daripada perang 'bawah'<sup>37</sup>. Perang 'atas' hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai ilmu kesaktian tinggi yang bisa mengubah dirinya dalam berbagai bentuk. Biasanya orang-orang sakti ini tujuannya hanya mengetes ilmu mereka. Namun tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa jumlah orang yang meninggal dalam

---

<sup>33</sup> Bourdieu menyebut kebenaran mutlak yang tidak bisa lagi dipertanyakan disebut *doxa*. *Doxa* merupakan tingkatan tertinggi dari ortodoksi, masyarakat hanya menerima tanpa mempertanyakan kembali maksud dan tujuannya (lihat Bourdieu, 1977).

<sup>34</sup> Elit-elit NW sering mengultimatum jama'ah NW yang belum menentukan pilihan supaya secepatnya memilih. Meminjam bahasa TGH. Anas Hasyri yang mengatakan 'kalau berada di tengah-tengah jalan maka akan digilas oleh kendaraan'. Posisi netral bukanlah pilihan yang terbaik bagi jama'ah NW karena mereka tetap akan menjadi sasaran dan target baik secara sengaja atau tidak sengaja.

<sup>35</sup> Rumah-rumah warga yang menjadi sasaran dan target ditandai dengan tulisan 'Hizbullah' atau 'Satgas'. Hizbullah adalah nama pam swakarsa yang didirikan oleh kubu R2, sedangkan 'Satgas Hamzanwadi' adalah pa swakarsa milik R1. Di dusun Paok Lombok bagian Timur pernah terjadi kesalah pahaman antara anggota Hizbullah, mereka membakar rumah salah satu anggotanya.

<sup>36</sup> *Pepadu* merupakan istilah yang digunakan untuk sebutan bagi orang-orang sakti di Lombok. Biasanya *pepadu* keluar pada malam hari untuk menjaga kampung atau sawah mereka dari pencuri.

<sup>37</sup> Istilah perang 'atas' yaitu perang diudara yang melibatkan orang-orang sakti yang berkelahi dengan cara terbang. Sedangkan perang 'bawah' adalah perang orang-orang biasa yang tidak terlalu sakti. Orang-orang sakti ini tidak mau menunjukkan ilmunya pada siang hari, biasanya mereka bertempur pada malam hari.

perang ‘atas’ ini. Sebagian mengklaim ratusan orang yang telah meninggal dalam perang atas ini.

Titik-titik kecamatan yang rawan konflik yaitu di Suralaga, Masbagik, Kota Raja, Wanasaba, Pringga Sela, Pringga Baya, Suka Mulia, dan Aikmel. Proses reproduksi konflik mengalami titik ekstrim jika terdapat elit-elit NW terutama tuan guru dari kedua kubu di satu desa. Konflik dan kekerasan tidak bisa dihindari karena tuan guru saling berebut simpati massa dan ingin menunjukkan kekuatan kubu masing-masing. Pada waktu yang bersamaan, tekanan-tekanan dari pusat juga sangat kuat kepada tokoh-tokoh lokal karena melalui mereka elit-elit di pusat bisa masuk ke desa tersebut. Misalnya, ketika elit-elit NW di pusat ingin mengadakan pengajian atau kampanye politik, maka yang menjadi panitia adalah tokoh-tokoh lokal di desa itu. Begitu juga sebaliknya, tokoh-tokoh lokal yang ingin menarik simpati elit-elit NW di pusat mereka menawarkan jasa dan fasilitas di desa mereka sehingga menimbulkan kecemburuan elit-elit lokal lain yang berbeda kubu. Dari sinilah kemudian konflik terus mengalami reproduksi dan polarisasi di komunitas-komunitas NW<sup>38</sup>.

Konflik dan kekerasan yang pertama kali terjadi di Pancor tahun 1998 terus meluas ke wilayah-wilayah lain di Lombok Timur. Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan antara kedua pendukung di desa Gotong Royong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya beberapa orang terluka. Di tahun ini juga terjadi kerusuhan di Desa Kesik yang menyebabkan puluhan orang terluka. Sepanjang tahun 2001 terjadi aksi saling serang di beberapa desa sehingga menimbulkan kerusakan dan pembakaran rumah. Pada tahun 2002 terjadi perang besar antara kedua pendukung di desa Wanasaba dan Paok Lombok yang menyebabkan 8 orang yang meninggal, ratusan rumah dibakar dan dirusak, dan ratusan orang mengungsi dari desanya. Pola konflik yang terjadi di desa-desa tersebut hampir sama yakni perebutan massa dan pengaruh di kalangan jama'ah NW melalui pengajian. Salah satu kubu selalu berupaya menggagalkan pengajian dari kubu yang lain karena dinilai politis dan akan mempengaruhi massa dari kubu mereka. Ada kekhawatiran jika nantinya pendukung mereka akan beralih ke kubu yang lain.

#### **F. Jalan Panjang Islah NW: Antara Keikhlasan dan Korporasi Politik**

Islah atau rekonsiliasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses resolusi konflik. Rekonsiliasi tidak hanya merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai, tetapi juga merupakan sebuah proses yang harus dijalani dan dilakukan oleh para pelaku dan korban konflik (Bloomfield et al., 2006: 11). Tujuan rekonsiliasi adalah membangun kembali kehidupan bersama antara pelaku dan korban pasca konflik dan kekerasan. Secara sederhana, rekonsiliasi adalah

---

<sup>38</sup> Saya melihat adanya tarik ulur kepentingan antara elit-elit NW di tingkat desa dengan elit-elit NW di tingkat pusat. Mereka yang dipusat tidak peduli dengan kondisi di desa tersebut jika terdapat potensi-potensi konflik, bahkan mereka cenderung memaksa dengan alasan bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang baik yaitu melakukan pengajian. Begitu juga elit-elit di tingkat desa, mereka sengaja mengundang elit-elit di pusat untuk memprovokasi elit-elit dari kubu lain.

menemukan jalan untuk hidup berdampingan dengan mantan musuh, tidak harus mencintai mereka, atau memaafkan mereka, atau melupakan masa lalu, tetapi *co-exist* untuk mengembangkan tingkat kerja sama membagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, semua memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada hidup terpisah (Ibid, 2006: 11). Tujuan ini tentu tidak mudah untuk dicapai tergantung pada intensitas dan kompleksitas dari sebuah konflik itu sendiri yang terkadang membutuhkan waktu panjang<sup>39</sup>.

Rekonsiliasi memiliki makna dan definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang atau komunitas. Rekonsiliasi mengarah pada restorasi dan rekonstruksi struktur sosial yang mengalami kekacauan sosial (*disorder*) dan instabilitas akibat konflik dan kekerasan yang berkepanjangan. Rekonsiliasi juga identik dengan proses penyembuhan (*healing*) luka dan trauma masyarakat yang menjadi korban, mencari keadilan (*justice*) dan kebenaran (*truth*) dan saling memaafkan (*forgiveness*) antara korban dan pelaku kekerasan (Skaar dan Bloomfield, 2008: 14). Keempat hal tersebut penyembuhan, keadilan, kebenaran dan memaafkan merupakan unsur-unsur yang fundamental dalam proses rekonsiliasi. Keempat unsur tersebut saling terkait satu sama lain meskipun tidak semua harus terpenuhi dalam proses rekonsiliasi<sup>40</sup>.

Proses rekonsiliasi bukan perkara mudah untuk direalisasikan pada kasus konflik dan kekerasan tertentu. Terkadang rekonsiliasi mengalami keberhasilan, dan terkadang juga banyak yang mengalami kegagalan total. Menurut David Bloomfield (2006) rekonsiliasi harus dilihat sebagai proses yang panjang yang membutuhkan beberapa dekade bahkan beberapa generasi (Bloomfield, 2006: 22). Konflik di Aceh, Ambon, Timur-Timor dan Kalimantan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai rekonsiliasi. Pendekatan untuk rekonsiliasi yang digunakan juga berbeda di setiap kasus. Apakah menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau atas ke bawah (*top-down*) tergantung pada pola-pola konflik yang berjalan. Konflik NW merupakan salah satu konflik di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam mencapai rekonsiliasi untuk sementara waktu. Konflik NW yang telah menginjak satu dekade lebih belum memperlihatkan tanda-tanda akan terjadinya rekonsiliasi terutama di tingkat elit. Sejak tahun 1998 hingga sekarang proses rekonsiliasi belum mengalami kemajuan yang berarti, bahkan setiap adanya inisiasi dan upaya rekonsiliasi selalu kandas di tengah jalan. Salah satu kubu berusaha untuk rekonsiliasi, tetapi kubu yang lain berupaya mempertahankan konflik.

Ditengah rumitnya untuk mencapai islah antara elit-elit NW, sebuah 'keajaiban' datang pada pertengahan bulan Mei 2010, terjadi kesepakatan untuk melakukan islah. Kedua putri Syeikh yaitu Rahun (R1) dan Raihanun (R2)

---

<sup>39</sup> Konflik di Aceh, Papua dan Timor-Timur termasuk konflik vertikal yang berkepanjangan di Indonesia. Pihak pemerintah dan kelompok-kelompok ini harus menunggu sampai berpuluh-puluh tahun untuk mencapai rekonsiliasi karena semua pihak bertahan pada posisi masing-masing (lihat Abdullah, 2006; Anwar et al., 2005; Tomagola, 2006).

<sup>40</sup> Sulit untuk merealisasikan keempat unsur rekonsiliasi tersebut. Inilah yang menyebabkan rekonsiliasi tidak pernah tuntas dan berpotensi menimbulkan konflik-konflik baru. Gerakan OPM milsanya masis eksis hingga sekarang meskipun telah terjadi kesepakatan dengan pihak pemerintah. Terdapat unsur-unsur rekonsiliasi yang tidak dicapai atau dipaksakan (lihat Siregar, 2004).

sepakat untuk bertemu di makam ayahnya di Pancor, Lombok Timur. R2 didampingi oleh putranya dan beberapa tokoh NW, begitu juga dengan R1. Setelah melakukan do'a bersama di depan makam Syeikh, mereka selanjutnya berkunjung ke rumah R1 yang tidak jauh dari makam tersebut. Pertemuan ini sangat spesial karena selama dua belas tahun pasca konflik dan perpecahan antara kedua mereka dan pendukungnya, sejak itulah mereka tidak pernah bertemu lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedua putri Syeikh tersebut secara mendadak melakukan kesepakatan untuk bertemu dan berislah? Apa kepentingan dibalik pertemuan kedua pemimpin NW ini? Padahal sebelumnya sulit sekali mempertemukan mereka walaupun dengan berbagai cara dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak ketiga termasuk pemerintah.

Data di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat dua hal yang mendasari terjadinya islah ini yaitu pertama, kerinduan keluarga Syeikh untuk bertemu. Satu dekade lebih sejak tahun 1998 hingga sekarang mereka belum pernah bertemu, bahkan mereka terlibat saling serang di mimbar-mimbar agama. Kedua, kepentingan politik Pilkada Lombok Tengah. Kedua faktor ini saling terkait, walaupun sebagian mediator islah tidak mengakui jika islah ini bersifat politis. Namun pada kenyataannya, elit-elit NW dari kubu R1 ikut menjadi tim sukses calon bupati Lombok tengah yang berasal dari keluarga R2 yang tidak lain adalah putra Raihanun TGH. Lalu Gede Sakti Amir Murni. Sulit untuk disangkal jika tawaran islah dari kubu R1 ke kubu R2 karena menjanjikan bantuan dukungan politik memenangkan Pilkada Lombok tengah. Sakti akan dapat memenangkan Pilkada jika massa NW bersatu, dia akan mengalami kesulitan untuk menang jika suara NW pecah. Raihanun sendiri tidak memiliki banyak pilihan kecuali menerima tawaran islah dari kubu R1 jika ingin anaknya memenangkan Pilkada. Keberhasilan kubu R1 dalam Pilkada 2008 ketika TGH. M. Zainul Majdi, putra Rahun, terpilih sebagai gubernur NTB menjadi referensi oleh kubu R2 jika kubu R1 lebih unggul dalam bidang politik.

Melihat peluang islah melalui ranah politik, maka elit-elit NW dari kedua kubu merancang pertemuan kedua putri Syeikh tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2010. Sebelum pertemuan kedua tokoh kunci NW tersebut terlebih dahulu diadakan pertemuan antara kedua putra mereka yaitu Syamsul Lutfi dan Sakti pada acara tablig akbar di Praya Lombok Tengah<sup>41</sup>. Para tuan guru, politisi dan jama'ah NW untuk pertama kalinya berkumpul bersama-sama di acara pengajian ini. Syamsul Lutfi dalam ceramahnya mengatakan, dulu perpecahan NW terjadi di Praya Lombok Tengah, maka islah atau persatuan NW juga dimulai dari Praya. Sakti juga memberikan sambutan dengan menekankan 'pentingnya jamaah NW bersatu dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan, biarlah orang tua urusan orang tua, sedangkan urusan anak sama anak-anak'. Selain mengadakan tablig akbar, kedua tokoh NW juga mengadakan pawai islah dari Lombok Timur hingga ke Mataram. Mereka juga mengadakan hiziban bersama para santri dari kubu R1 dan R2 di Pancor. Fenomena lain yang menarik adalah kedua putri Syeikh, R1 dan

---

<sup>41</sup> Syamsul Lutfi adalah putra Rahun yang berhasil menduduki kursi walik bupati Lombok Timur pada Pilkada 2008.

R2 hadir pada acara kampanye politik Sakti untuk menarik simpati jamaah NW dan sekaligus menunjukkan jika NW benar-benar islah.

Terlepas dari adanya kepentingan politik di dalam proses islah atau rekonsiliasi NW, tetapi islah kedua keluarga Syeikh ini telah memberikan dampak yang sangat positif di semua aspek. Islah ini telah melebur sekat-sekat yang menjadi pemisah selama ini antara kubu R1 dan R2. Islah juga secara tidak langsung dapat mengurangi tekanan bagi jamaah NW sebagai orang yang selalu 'dicurigai' memihak ke salah satu kubu. Sedangkan secara politis islah NW telah mendongkrak perolehan suara Sakti dengan menempati posisi pertama pada Pilkada Loteng. Sakti memperoleh 24% suara yang disusul oleh pasangan Maik Meres 21%, Jari 19% dan Suke 19%. Hasil ini sangat fantastis untuk Sakti karena dia merupakan calon yang tidak difavoritkan sebelumnya<sup>42</sup>. Meski diurutan pertama Sakti harus bertarung pada putaran kedua karena tidak ada pasangan yang memperoleh lebih dari 50% jumlah total suara.

Keberhasilan Sakti dalam menempati urutan pertama pada putaran pertama Pilkada Lombok Tengah tidak membuat semua pihak dengan tulus menerima islah. Sebagian juga tidak mengakui jika keberhasilan tersebut karena bantuan pihak R1. Pihak-pihak yang tidak menginginkan islah menilai jika islah hanya bersifat keluarga, bukan bersifat organisasi. Pertemuan kedua putri Syeikh memang belum menyentuh pembahasan tentang penyatuan kepemimpinan organisasi, tetapi lebih pada islah keluarga. Sebagian tokoh dari kubu R2 masih menguji keseriusan kubu R1 dalam membantu kemenangan Sakti. Jika Sakti menang pada putaran kedua maka islah secara organisasi akan lebih gampang, tetapi jika kalah maka islah ini akan terancam gagal, kata salah seorang tokoh dari kubu R2.

Berbeda dengan kubu R1 yang menginginkan islah dari sejak konflik dan perpecahan NW. Di setiap kesempatan TGH. M. Zainul Majdi selalu mewacanakan islah. Bahkan pencalonannya sebagai gubernur NTB pada Pilkada 2008 memiliki agenda khusus yakni menyatukan NW. Majdi merasa membutuhkan kekuatan yang lebih karena selama ini dia selalu didiskreditkan oleh kubu R2. Agenda besar Majdi untuk menyatukan NW ternyata berhasil setelah dua tahun menjabat sebagai gubernur NTB. Tawarannya untuk membantu Sakti yang merupakan representasi politik kubu R2 dalam kemenangan Pilkada di Lombok Tengah menjadi bukti jika dia berhasil merealisasikan janjinya. Pada acara hari ulang tahun NW yang ke 75, Majdi mengundang keluarga dan elit-elit NW dari kubu R2 dan mengatakan, 'saya bukan kampanye politik mendukung adik misan saya, tetapi saya hanya memotivasi saudara sepupu saya supaya terus maju memenangkan pertarungan pada putaran kedua sebagai calon bupati, tidak boleh setengah-setengah'. Posisi Majdi sebagai gubernur NTB memaksanya harus netral di setiap Pilkada sehingga dia tidak boleh ikut berkampanye.

Rencana islah pada level organisasi akan dilakukan pasca Pilkada di Lombok Tengah. Menurut Mugni, salah seorang tokoh NW R2 bahwa islah organisasi akan berjalan lancar jika Sakti memenangkan Pilkada pada putaran

---

<sup>42</sup> Pada Pilkada tahun 2005, Sakti juga pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Lombok Tengah. Dia berada diurutan nomor terakhir dari calon-calon yang lain. Pada waktu itu NW telah mengalami konflik dan perpecahan sehingga suara NW terpecah.

kedua. Hari pelaksanaan Pilkada akhirnya datang juga pada tanggal 23 September 2010. Sakti yang diperkirakan menang telak justru mengalami kekalahan. Pasangan Maik Meres, lawan politik Sakti berhasil memenangkan Pilkada dengan prolehan 69% suara sah, sedangkan Sakti hanya memperoleh 41% suara. Hasil Pilkada putaran kedua ini membuat sok elit-elit NW termasuk kubu R1 yang telah berusaha keras memenangkan Sakti. Hingga sekarang keberlanjutan rencana islah pada tingkat organisasi belum ada *follow up*, bahkan terdapat kecenderungan jika islah organisasi akan gagal terlaksanakan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Konflik NW merupakan konflik politik dalam perebutan kekuasaan di dalam organisasi NW. Ketika unsur politik dan kekuasaan sangat dominan, maka salah satu bentuk resolusi konflik NW harus melalui sharing kekuasaan atau kerja sama politik baik di dalam maupun di luar NW. Kenapa elit-elit NW harus bersusah payah mempertahankan konflik untuk kekuasaan yang kecil di NW, jika terdapat tawaran sharing kekuasaan yang lebih luas. Saya melihat islah NW yang berlangsung pada bulan Mei 2010 yang kental dengan unsur politisnya merupakan sesuatu yang wajar. Langkah ini sudah cukup tepat mengingat konflik NW adalah konflik kekuasaan. Yang lebih penting sekarang ini adalah bagaimana memfollow up islah keluarga ini menjadi islah organisasi. Saya melihat setidaknya terdapat dua hal yang sangat urgen untuk dibahas dalam proses rekonsiliasi NW yaitu, pertama, persoalan khilafiyah tentang status kepemimpinan perempuan yang menjadi akar konflik dan perpecahan NW pada Mukhtamar Praya tahun 1998. Kedua kubu memiliki pandangan yang berbeda tentang status kepemimpinan perempuan di dalam organisasi NW yang menganut Mazhab Syafi'i. NW Pancor menafsirkan jika dalam Mazhab Syafi'i perempuan tidak boleh menjadi pemimpin termasuk pemimpin organisasi, sedangkan NW Anjani menafsirkan sebaliknya. Menurut pendapat saya, NW perlu membentuk perangkat atau lembaga khusus yang membahas persoalan khilafiyah di NW dan persoalan-persoalan kekinian yang terjadi di masyarakat secara luas seperti lembaga Bahsul Masail di NU atau Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Hanya NW yang belum memiliki lembaga sejenis ini padahal sumber daya yang dimiliki oleh NW sangat menjanjikan. Kedua, persoalan status kepengurusan organisasi yang menganut dualisme kepemimpinan. Kedua kubu masih bertahan pada posisi masing-masing dan mengklaim sebagai kelompok yang sah dan yang lain tidak sah.

Menyatukan kepemimpinan NW sekarang ini bukanlah perkara yang gampang karena keduanya sama-sama mapan baik dalam sistem maupun struktur organisasi. Keduanya mempunyai kepengurusan dari tingkat pusat hingga ke tingkat cabang dan ranting. Dalam tulisan ini saya menawarkan beberapa pilihan yang bisa dijadikan sebagai langkah reskonsiliasi yaitu pertama, kepengurusan NW harus melebur menjadi satu garis kepemimpinan. Salah satu pengurus NW harus mengalah dan membubarkan diri dan menyatu ke dalam pengurus NW yang lain. Sanggupkah salah satu kubu membubarkan diri dan melebur menjadi satu? Pilihan ini sulit direalisasikan karena banyak kepentingan individu dan kelompok yang akan tergeser atau terancam, tetapi dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik NW. Kedua, de-sentralisasi NW.

Pengurus NW di tingkat pusat melebur menjadi satu, tetapi salah satu kubu memiliki hak otonomi untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Pilihan ini yang paling realistis sebagai format rekonsiliasi NW. Ketiga, NW tetap berjalan seperti sekarang ini menganut dualisme kepemimpinan, tetapi harus ada persetujuan (MoU) antara elit untuk menjamin keamanan. Pilihan ini tidak terlalu sulit karena masyarakat NW secara umum menginginkan supaya tetap aman meskipun NW terbagi ke dalam dua kubu. Hanya saja konflik NW tidak akan pernah tuntas karena konflik akan selalu muncul ketika terjadi benturan kepentingan antara elit NW. Keempat, menyerahkan kepemimpinan organisasi NW ke publik. Keturunan Maulana Syeikh cukup hanya sebagai pembina dan pengontrol jalannya organisasi. Pilihan ini juga sulit karena tingginya ketergantungan jamaah NW kepada keluarga Maulana Syeikh.

Dari pilihan-pilihan di atas saya melihat bahwa 'de-sentralisasi NW' merupakan pilihan yang paling tepat karena tidak harus mengorbankan salah satu kubu. Justeru yang dibangun adalah kerja sama antara kedua elit NW (Anjani dan Pancor) dan saling memasuki. Sebagian pengurus NW Pancor dan NW Anjani bergabung kembali di kepengurusan tingkat pusat yaitu di Pancor, kemudian membentuk kepengurusan yang independen di Anjani. Anjani dijadikan sebagai negara bagian di dalam wilayah NW. Kepengurusan independen di Anjani memiliki hak otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus aset-aset yang ada disana. Praktik-praktik de-sentralisasi NW juga bisa diterapkan ke wilayah-wilayah NW yang lain yang merasa siap misalnya cabang NW Kembang Kerang, Lombok Timur pimpinan TGH. Ruslan Zain. Paradigma pemisahan diri, makar, disintegrasi, atau keluar dari NW oleh elit-elit NW tertentu harus diubah ke paradigma de-sentralisasi, di mana mereka membutuhkan dukungan moril dan materil, bukan untuk dibuang. Bagaimanapun mereka adalah kader-kader NW yang juga merupakan modal sosial yang dimiliki oleh NW.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagshaw, Dale. 2003. *Challenging Discourses of Violence and Promoting Discourses of Peace: A Role for Mediators in Our Conflicted Region*. Makalah belum diterbitkan dan disampaikan pada 2th Asia Pasific Mediation Forum: Developing Mediation Culture, Singapura: 19-22.
- Baharuddin dan Rasmianto. 2004. *Maulana Lentera Kehidupan Umat*. Malang: Mintra Insan Cendekia.
- Baharuddin. 2007. *Nahdlatul Wathan & Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Press.
- Barton, Greg, Fealy, Greg (ed). 1997. *Tradisionalisme Radikal*. Yogyakarta. LKiS.
- Bloomfield, David, Barnes, Teresa dan Huyse, Luck. 2006. *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook*. USA.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- BPS Provinsi NTB. 2008. *NTB dalam Angka*. Mataram: BPS NTB
- BPS Lotim. 2006. *Lombok Timur dalam Angka*. BPS Lotim
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS.
- Cady, Linell E, Simon, Sheldon W (Ed). 2007. *Religion and Conflict in South and Southeast Asia: Disrupting Violence*. London dan New York: Routledge.
- Colombijn, Freek. 2001. What is so Indonesian about Violence. Dalam Wessel, Ingrid dan Georgia, Wimhofer. *Violence in Indonesia*. Hamburg: Hem. Abera Press.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Alih bahas Ali Mandan, Jakarta: CV. Rajawali.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3ES.
- Eriksen, T.H. 2001. *Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology*. London, Sterling dan Virginia: Pluto Press.
- Foucault, Michel. 1970. *The Order of Discourse: An Archeology of the Human Sciences*. London: Tavistok.
- Giddens, Anthony. 1989. *Sociology*. Oxford: Polity Press
- Hall, Stuart ed. 1997: *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Haryatmoko. 2003. "Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa", *BASIS menembus fakta*, vol. 52, no. 11-12.
- Harker, Richard, ed. 2006. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Theory of Practice*. Alih bahasa oleh Pipit Maizier, Yogyakarta: Jalasutra.
- Kristiansen, Stein. 2003. Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat. *Sojourn*, vol. 18: 110-138.
- Lessa, I. 2006. "Discursive Struggles within Social Welfare: Retaging Teen

- Motherhood". *British Journal of Social Work*, vol, 36: 283-298.
- Macdougall. 2007. Criminality and the Political Economy of Security in Lombok dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London dan New York: Routledge
- Mugni. 2005. *Nahdlatul Wathan Pasca Maulana Syaikh*. Draf buku yang belum diterbitkan.
- Nazri. 2000. *Membedah Konflik Rauhun-Raehanun*. Mataram NTB.
- Noor, Mohammad et al. 2004. *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta.
- Nugroho, Fera, Dirdjosanjoto, Pradjarto, Kana, Nico L. 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik & Pustaka Pelajar.
- Nu'man, Hayyi. 1999. *Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. NTB: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Alih bahasa oleh Wahono, S, Bilfagih, B, Huda, H, Helmi, M, Sutrisno, J, Manadi, H. Jakarta: Serambi.
- Ridwan, Nur Khalik. 2010. *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Saprudin. 2005. *Konflik Kekuasaan di Tubuh Organisasi Nahdlatul Wathan Antara Kubu Hajjah Siti Rauhun dengan Kubu Hajjah Siti Raihanun*. Tesis belum diterbitkan di program master jurusan Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.
- Smith, Bianca J. dan Hamdi, Saipul. 2009. The Politics of Female Leadership in Nahdlatul Wathan Pesantren, Lombok, Eastern Indonesia dalam *International Journal of Pesantren Studies*. Volume 3, No. 1, pp 1-25.
- Syakur, Ahmad Abd. 2006. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press.
- Tomagola, Tamrin Amal. 2006. *Republik Kapling*. Yogyakarta: Resist Book.
- Van Klinken, G. 2005. "Pelaku Baru, Identitas Baru: Kekerasan antar Suku pada Masa Pasca Suharto", dalam Anwar et al., (ed). *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Kerjasama Yayasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV.
- Van Bruinessen, Martin. 2007. Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia dalam Van Bruinessen, Martin & Howel, Julia. *Sufism and the Modern in Islam*. New York: IB Tauris.
- Woodward, Mark. 2007. Religious and the Globalization of Knowledge in Indonesian History dalam *Religion and Conflict in South and Southeast Asia: Disrupting Violence*. London dan New York: Routledge.
- Yusuf, M. 1976. *Sejarah Ringkas Perguruan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah & Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah*. Selong: PB NW.